RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HT

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : PENILIKAN KE-2

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Suhardi	Internal	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL bid. Produksi & VLK Hutan
3.	Ir Marthen Edy	Eksternal	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ardi Kusatrianto, S.Sos	Eksternal	Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I
b. Alamat Kantor : Jl HM Ardan No 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
d. SK IUPHHK-HT : No. 407/Kpts-II/1996 Tanggal 5 Agustus 1996
e. Luas Areal IUPHHK-HT : 10.976,40 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com
h. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Robert Siagian
- Komisaris Utama : Stanley Najoan
i. *Management Representatif* : Heru Riyanto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 18 September 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Imon, S.Hut, MP Jabatan Plt. Ka. Sub. Bagian Umum. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda.
Perjalanan Kedatangan	19 September 2019	Samarinda – Base Camp Pesab Kutai Timur
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Pesab PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 20 September 2019	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesediaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Pesab dan Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, 20 - 22 September 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting Hotel Harum Segar, Muara Wahau 23 September 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	23 September 2019	Base Camp Pesab Kutai Timur – Samarinda
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 24 September 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar jabatan Plt. Kabid PPH. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 16 Oktober 2019	1. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dinilai LULUS penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan predikat **BAIK** (84,85% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. 2. Status S-PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan predikat BAIK.

3. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I lengkap yaitu : 1. SK.Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 tentang Pemberian HPHTI Atas Areal Hutan Seluas ± 10.000 Ha di Prov Kaltim Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya; 2. Penetapan Batas oleh Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.273/MENHUT-II/2007 tgl 7 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI Dalam Hutan Tanaman PT. Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 Ha di Prov. Kalimantan Timur; 3. Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan realisasinya di lapangan yaitu : 4. Laporan Pelaksanaan Tata Batas No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 1999 sepanjang 33.005,60 meter dan Lampiran Peta-petanya; 5. Laporan Pelaksanaan Tata Batas No.13/IV-2/PP/1999 November 1999 sepanjang 44.311,90 meter dan Lampiran Peta-petanya. 6. Berita Acara Pembuatan Batas Luar dan Sendiri/Persekutuan Definitif Hutan Produksi Tetap sepanjang 77.317,50 meter dibuat tanggal 18 Desember 1999 oleh Panitia Tata Batas sesuai SK Gubernur Prov Kaltim Nomor: 492 Tahun 1991 dan SK Menhut Nomor : 635/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996; 7. Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian, Akte Perubahan, NIB dan NPWP tersedia sebagai berikut : - Akta Pendirian No. 4 tgl 01 April 1992 Notaris Benny Kristianto, SH. Tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Juli 1992 No. 53. - Akte Perubahan No. 21 tgl 08 Desember 2014 oleh Notaris Linda Herawati S.H; Direktur Utama : Robert Siagian Direktur : Hoesin Komisaris Utama : Stanley Najoan Komisaris : Wisly Dwi Putra - NPWP No. 01.585.575.2-722.001 alamat Jl. HM Ardan (Ex Ring Road II) No. 65 RT. 001

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sempaja Utara Samarinda Utara Samarinda – Kalimantan Timur - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Sumalindo Hutani Jaya Nomor 9120102261629 tanggal 12 Februari 2019
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi Tata Batas Luar Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I sudah temu gelang (100 %) sesuai dengan laporan tata batas yang tersedia dan berita acara tata batas sepanjang 77.317,50 meter; Terdapat laporan penataan batas dan BAP sebagai berikut : 1. Laporan Pelaksanaan Tata Batas No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 1999 sepanjang 33.005,60 meter dan Lampiran Peta-petanya; 2. Laporan Pelaksanaan Tata Batas No.13/IV-2/PP/1999 November 1999 sepanjang 44.311,90 meter dan Lampiran Peta-petanya. 3. Berita Acara Pembuatan Batas Luar dan Sendiri/Persekutuan Definitif Hutan Produksi Tetap sepanjang 77.317,50 meter dibuat tanggal 18 Desember 1999 oleh Panitia Tata Batas sesuai SK Gubernur Prov Kaltim Nomor: 492 Tahun 1991 dan SK Menhut Nomor : 635/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996; Batas areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I sudah mendapat penetapan sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor : 273/MENHUT-II/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 Ha.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Eksistensi areal IUPHK-HT PT SHJ Unit I telah diakui oleh para pihak terbukti dengan adanya penataan batas temu gelang yaitu BAP Penataan Batas telah ditandatangani oleh para pihak. Namun demikian hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa lokasi patok batas sebagian tidak ditemukan di lapangan dan banyak dijumpai adanya konflik lahan dengan masyarakat di mana areal yang sudah ditatabatas masih dibuka untuk perladangan dan pemukiman masyarakat. Sebagian patok batas yang dipancang tidak dijumpai lagi di lapangan, Keberadaan IUPHHK-HTI PT SHJ (Unit I) dari aspek yuridis telah diakui oleh pihak pemerintah sesuai izin usaha di bidang kehutanan yang telah dimiliki, namun kenyataan di lapangan terdapat konflik batas atau klaim lahan dari pihak lain. Berdasarkan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan konflik batas atau lahan di areal PT SHJ (Unit I) diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir terjadi perkembangan tentang adanya penyelesaian konflik setelah melakukan sosialisasi, pertemuan-pertemuan dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sebagian masyarakat dan warga Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur namun masih belum seluruhnya. Luas areal konflik saat ini tercatat sebesar ± 4.309 Hektar. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I selama ini tidak melakukan pemeliharaan batas terbukti bahwa hasil pengecekan patok batas hanya menemukan 1 (satu) patok yaitu patok batas No. SHJ 350 pada koordinat N 01^0 13' 19,4" E 117^0 04' 27,9"; sedangkan sampling pada patok No. SHJ 280 pada koordinat N 01^0 13' 19,4" E 117^0 04' 27,9"; dan patok batas No. SHJ 140 pada lokasi overlapping areal dengan PT Gunta Samba Jaya pada koordinat N 01^0 15' 25,5" E 117^0 00' 38,3"; serta patok batas No. SHJ 30 batas APL pada koordinat N 01^0 12' 41,2" E 116^0 58' 04,3"; tidak dapat ditumukan patok batasnya.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	N/A	Hasil Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 50.000 tanggal 29 September 2017; yang merupakan overlapping dengan acuan lampiran Peta SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Kaltim dan Kaltara Skala 1 : 250.000 menunjukkan tidak terdapat perubahan kawasan;
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Terdapat penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan untuk perladangan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Terhadap penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, PT SHJ (Unit I) telah melakukan upaya mendata penggunaan kawasan hutan. tetapi tidak seluruhnya dibuat laporan kepada pihak berwenang. Terdapat surat kepada perusahaan sawit (PT KAPAS dan PT Gunta Samba Jaya) tentang Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan PT SHJ Unit I, dengan tembusan Muspika Kecamatan Kongbeng dan Kepala Desa Miau Baru. Upaya perusahaan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara intensif dan terus menerus sebagai cara untuk mendata dan menyelesaikan adanya penggunaan kawasan oleh masyarakat dan penggunaan kawasan hutan yang berada di lokasi kerja PT SHJ Unit I oleh perusahaan perkebunan dengan menyusun prioritas 10 (sepuluh) lokasi konflik lahan yang rata-rata tergolong berat. Hasil observasi lapangan telah ditemukan beberapa perkebunan kelapa sawit milik perorangan, kelompok tani dan perusahaan sawit yang berada di dalam areal konsesi PT SHJ Unit I dengan umur tanaman sawit yang bervariasi yaitu bulan sampai tahunan bahkan ada yang sudah panen.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama PT SHJ I Nomor : 01/Dir/I/2016 Bulan Januari 2016. Visi dan misi PT SHJ I telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan dokumen visi dan misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I di papan pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, di halaman kantor, di nursery, kantin dan sebagainya. Sosialisasi Visi dan Misi PT SHJ I dilakukan kepada karyawan dan pekerja dalam setiap pelaksanaan training kepada karyawan/ pekerja dan pertemuan sosialisasi secara khusus. Terdapat sosialisasi kepada karyawan tanggal 14 April 2019 dengan dokumen BAP dan daftar hadir serta foto dokumentasi. Sedangkan kepada masyarakat terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa BAP sosialisasi visi dan misi di Desa Suka Maju, Desa Miau Baru dan Desa SP IV dan Muspika Kecamatan Kongbeng.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum pencapaian target operasional produksi, selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum terpenuhi dengan baik, termasuk kegiatan penanaman maupun produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, PSP diukur dan diolah datanya, tidak terdapat produksi kayu hasil tanaman (harvesting) sedangkan untuk produksi pembuatan tanaman atau penanaman selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum dapat mencapai seperti target yang ditetapkan pada dokumen RKT yang disahkan (RKT 2018 10,10% dan RKT 2019 1,50%). Untuk fungsi ekologi secara umum implementasinya dapat dikatakan baik walaupun masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaah hutan lestari seperti pemenuhan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pelaporan pengelolaan flora fauna. Di bidang sosial juga sudah cukup baik walaupun masih dijumpai terdapat konflik berkaitan dengan perambahan dan pemukiman serta

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			perladangan. Aspek sosial belum sepenuhnya mencapai target seperti tercantum pada dokumen RKT yang disahkan sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas < 200.000</th><th>PT SHJ I 10.976,4</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nenhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Binhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PKB-R</td><td>2</td><td>3</td><td>Memenuhi +1</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>6</td><td>7</td><td>Memenuhi +1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT SHJ I tahun 2018 dan 2019 telah terealisasi rata-rata sebesar 86,25% yaitu :
- Tahun 2018 Rencana 39 Orang dan Realisasi 33 Orang atau 84,61%
- Tahun 2019 Rencana 33 Orang dan Realisasi sampai dengan September 2019 sebesar 29 Orang atau 87,88%. Sesuai jadwal training PT SHJ Unit I sudah melaksanakan rencana trainingnya dan tersisa kegiatan training lain-lain yang dimungkinkan akan dapat dilaksanakan sampai dengan Desember 2019</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT SHJ I telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketenagakerjaan			dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti Serikat Pekerja, PKB, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur serta memiliki kecukupan tenaga teknis PHPL sesuai dengan ketentuan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT SHJ I No. 02/Dir/V/2016 bulan Mei 2016 tentang Penetapan Bagan Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I Tersedia Job Description untuk setiap jabatan yang diperlukan beserta kualifikasi kebutuhan personil yang akan menjabatnya. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM di Bascecamp Pesab yang cukup lengkap dan kondisi jaringan internet yang cukup namun kecepatannya masih belum lancar. Terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT SHJ I. Petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem informasi manajemen di PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah ditunjuk Sdr. Yusuf Wibisono dengan Jabatan Information Technology (IT). Job description untuk jabatan IT terurai secara jelas fungsi dan tanggungjawab terkait dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penggunaan peralatan dan personil yang melaksanakannya sehingga peralatan berfungsi optimal.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Jabatan SPI/ Internal Audit sesuai dengan strukturnya dijabat oleh Saifudin sesuai dengan Surat Penunjukkan Personil SPI No. 038/SHJ/HR/III/2017 Internal Audit PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyusun dokumen rencana audit tahunan (Audit Plan) yang berisi rencana pelaksanaan pemeriksaan pada setiap aspek operasional dan non operasional. Laporan audit periode Januari – April 2019 mencakup lingkup audit untuk memeriksa kecukupan pengendalian internal dan melakukan evaluasi atas kepatuhan penerapan SOP dan kebijakan perusahaan terhadap kegiatan Proyek Sipil, VRA dan Jalan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan operasional pembangunan tanaman HTI dan pendukung lainnya masih belum dijangkau oleh internal audit selama periode audit.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Baik	Terdapat laporan hasil audit internal yang telah ditindaklanjuti pada seluruh hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Hasil telaah dokumen tindak lanjut diketahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas temuan SPI telah ditindaklanjuti dan diselesaikan di lapangan pada masing-masing kegiatan yang harus ditindaklanjuti.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Baik	Secara umum pelaksanaan RKT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tahun 2018 dan 2019 telah disetujui dan disosialisasikan pada masyarakat sekitar yang terkena dampak dengan adanya BAP FPIC PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dengan Masyarakat Desa sekitar. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberian informasi awal yang memadai untuk mendapatkan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			persetujuan pada RKT 2018 telah dilaksanakan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. Dokumen FPIC/ Padiatapa yang diverifikasi telah dilakukan pada 3 (tiga) Desa yaitu Desa Miau Baru dan Desa Suka Maju (SP V) dan Desa SP IV.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Secara umum, persetujuan batas PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah dilakukan oleh para pihak yaitu Pihak Pemerintah, Pihak Masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, serta oleh Pihak Perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. Namun demikian berdasarkan observasi lapangan dan verifikasi data monitoring dan evaluasi rencana penyelesaian konflik, di lapangan masih banyak dijumpai adanya konflik batas dan tumpang tindih areal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam proses tata batas masih belum seluruhnya dan baru dari sebagian para pihak di atas 50 %.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I setiap tahunnya telah disetujui dan disosialisasikan dengan adanya persetujuan pelaksanaan RKT setiap tahunnya, dan persetujuan dari masyarakat dan desa sekitar yang menjadi sasaran pelaksanaan kelola sosial seperti Desa Suka Maju dan Desa Miau Baru terdapat bukti persetujuannya. Dokumen FPIC/ Padiatapa kelola sosial yang diverifikasi hanya dilakukan pada 3 (tiga) Desa yaitu Desa Miau Baru dan Desa Suka Maju (SP V) dan Desa SP IV, sedangkan sosialisasi dan padiatapa pada desa SP III masih belum terdapat bukti pelaksanaannya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT SHJ UNIT I yaitu Desa Suka Maju dan Desa Miau Baru. Walaupun sudah disosialisasikan namun masih tetap terjadi perambahan kawasan lindung oleh masyarakat untuk ditanami tanaman perkebunan. Dengan kata lain sosialisasi dan persetujuan tentang kawasan lindung secara umum masih belum seluruhnya dilakukan kepada para pihak karena di lapangan masih terdapat pembukaan lahan perladangan di kawasan lindung

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen rencana jangka panjang (*manajemen plan*) berdasakan keberadaan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2010 – 2019 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan RI melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010 beserta Lampiran peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Berdasarkan wawancara terhadap Kepala BPHP Wil XI Samarinda dan *Manajemen Representatif* PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) didapatkan informasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat penataan areal kerja pada RKTUPHHK-HTI yang telah direncanakan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019. Berdasarkan telaah kesesuain penatan areal kerja diverifikasi bahwa Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) sebagian (60%) sesuai dengan RKUPHHK.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Baik	Berdasarkan observasi lapangan secara *random sampling dan verifikasi* menggunakan *softwere PDF maps* diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan petak dilapangan seluruhnya (100%) keberadaanya terlihat jelas dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Sedang	PT SHJ Unit I memiliki data potensi tegakan 3 tahun terakhir berdasarkan inventasisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan potensi masing-masing sebesar 56,05 m3/Ha, 56,05 m3/Ha, dan 74,28 m3/Ha. Namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	PT SHJ Unit I memiliki data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis sesuai dengan Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2018, Januari 2019. Laporan memuat hasil pengukuran Petak Ukur Permanen pada Pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 secara periodik satu tahun sekali tanaman *Eucalyptus pelita*. Hasil analisis riap diketahui rata-rata MAI sebesar 38.67 M3/Ha/Tahun. Pemeriksaan Lapangan secara sampling dapat diverifikasi keberadaan dan kebenaran data pengukuran PSP pada Petak 52G Zone 13.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	Didapatkan bukti analisa data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir berdasarkan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2018, Januari 2019. PT SHJ Unit I telah melaksanakan pelaporan analisa riap PUP kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Kepala Pusat Penilitian dan Pengembangan Hutan, sesuai surat PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) nomor: 01/HTI-PMD/SHJ1/KLTM/PSP/II/2019 tanggal Maret 2019. Pada RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 penentuan JTT diverifikasi berbasis data hasil inventarisasi/PHI dan belum berbasis data riap tegakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9/12) 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki SOP Seluruh tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan yaitu THPB, mencakup pedoman/ prosedur kegiatan : a. Penataan Areal Kerja b. Risalah Hutan c. Pembukaan Wilayah Hutan d. Pengadaan Bibit e. Penyiapan Lahan f. Penanaman g. Pemeliharaan h. Pemanenan i. Perlidungan dan Pengamanan Hutan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Pada periode audit Penilikan Ke-2 dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, dengan kondisi : a) Penataan Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja berupa pemberian tanda batas berupa pemberian Plang RKTUPHHK-HTI dan Patok Petak. b) Risalah Hutan Pemeriksaaan lapangan dapat dijumpai penandaan pohon atas pelaksanaan risalah hutan atas kegiatan QA PAT pada tanaman umur 2 Bulan dann 12 Bulan di Petak 62B/13 dan kegiatan QA PAT pada tanaman umur 12 Bulan di Petak 53B/13. Diverifikasi data yang diambil telah sesuai. c) Pembukaan Wilayah Hutan Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 per Agustus 2019 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) sudah tidak merencanakan pembukaan/ pembuatan jalan baru. Kegiatan yang direncanakan yaitu pemeliharaan jalan/ *maintanance*. d) Pengadaan Bibit PT Sumalindo Hutani Jaya telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit yang digunakan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				untuk penanaman berasal dari Persemaian atau Nursery Group, PT Surya Hutani Jaya. Berdasarkan Laporan Bulanan HTI, didapatkan realisai pengadaan bibit pada : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 sebesar 40.880 BST dari rencana 957.897 BST atau teralisasi sebesar 6%. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 per Agustus sebesar 3.977 BST dari rencana 480.000 BST atau teralisasi sebesar 0,41%. e) Penyiapan Lahan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan implementasi penyiapan lahan. Metode yang digunakan yaitu Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar Seresah. Implemetansi Penyiapan Lahan dapat diverifikasi pada Petak 62B2 pada koordinat N 00°13'57,57" dan E 117°13' 13,71". f) Penanaman PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan implementasi Penanaman. Berdasarkan Laporan Bulanan HTI, didapatkan realisai Penanaman pada : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 seluas 49,9 Ha dari rencana seluas 491 Ha atau teralisasi sebesar 10,16%. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 per Agustus seluas 4,6 Ha dari rencana seluas 300 Ha atau teralisasi sebesar 1,53%. Pemeriksaan Lapangan terhadap implementasi penanaman dapat diveriifkasi pada Petak 62B2 pada koordinat N 00°13'57,57" dan E 117°13' 13,71" dengan jenis tanaman Eucalyptus pelita berumur 8 bulan. g) Pemeliharaan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan implementasi Peneliharaan tanaman. Observasi Lapangan terkait implementasi pemeliharaan yaitu : - WD 2 Spray di Petak 62C1 pada koordinat N 00°13'44,56" dan E 117°03' 07,74" dengan jenis tanaman Eucalyptus pelita

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berumur 7 bulan. - WD 4 Spray di Petak 62B2 pada koordinat N 00°13'57,57" dan E 117°13' 13,71" dengan jenis tanaman Eucalyptus pelita berumur 8 bulan. h) Pemanenan Pada periode RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 s.d. 2019 per Agustus 2019 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum melaksanakan implementasi kegiatan pemanenan. i) Perlindungan dan Pengaman Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Berdasarkan Observasi Lapangan dapat diverifikasi implementasi diantaranya : - Keberadaan satpam PH sebanyak 4 Orang dan Pos security untuk penjagaan Aset dan Areal Kerja. - Plang Larangan Merambah, Menguasai, Membakar dan Melakukan Kegiatan Perkebuanan di dalam Kawasan Hutan Terdapat implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur sebanyak (88,89 %) atau terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 diketahui daur yang ditetapkan yaitu 6 Tahun. Berdasarkan pelaksanaan risalah hutan/ inventarisasi hutan pada pengukuran PHI Tahun 2018 atas tanaman *Eucalytus pelita* tahun tanam 2013 yang terdapat potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 82,52 M3/Ha.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Tingkat kecukupan potensi permudaan berdasarkan laporan Bulanan QA PAT umur 12 Bulan Periode Januari s.d. Agustus 2019 didapatkan stocking tanaman *Eucalytus pelita* sebesar 96,5%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki SOP Reduce Impact Logging Nomor SOP/SHJ I/PNP-03 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. Terdapat SOP penunjang pemanfaatan / pengelolaan ramah lingkungan melalui SOP Micro Planning dengan nomor SOP/SHJ I/P-28 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. Kegiatan Reduced Impact Logging (RIL) meliputi kegiatan perencanaan pemanenan sampai kegiatan pemanenan. Sementara kegiatan Micro Planning meliputi pembuatan rencana detail jalan sarad, TPn, feeling coupe, jalur tebangan, jalur extraction, serta pembuatan batas-batas petak / Blok tebangan, batas areal claim, batas areal konservasi / HCVF seperti : areal sempadan sungai, areal tanaman kehidupan, areal tanaman unggulan, dan areal lindungan lainnya.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Berdasarkan Observasi Lapangan didapatkan bukti pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat diverifikasi diantaranya : a. Penggunaan teknologi softwere ArcGIS untuk pembuatan peta rencana kerja rencana pemanenan. b. Pengelolaan Limbah B3 di Basecamp Sei Pesab. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 kegiatan pemanenan hasil
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	N/A	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) pada periode audit baik pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 tidak terdapat kegiatan pemanfaatakan hasil hutan. Dengan demikian, pada periode audit nilai faktor eksploitasi tidak dapat diterapkan penilaiannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HT diantaranya : - Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 merupakan Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2017, disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat keputusan Nomor : 61/Kpts/DK-II/2018 tanggal 5 Maret 2018. SK berlaku sampai dengan 18 Maret 2019. - Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 telah disahkan secara self approval melalui SK Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan SK Nomor SK.001/RKT-SHJ-I/III/2019 tanggal 15 Maret 2019. SK berlaku sampai dengan 12 Desember 2019. Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau disahkan secara self approval.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Terdapat peta kerja sesuai RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil telaah terhadap lampiran peta RKTUPHHK-HTI Tahun dan Tahun 2018 2019 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) skala 1:50.000 secara rinci menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipaen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Tanaman Unggulan (warna biru) beserta kawasan lindung (warna merah) berupa Kawasan Lindung dan Sempadan Sungai sesuai RKUPHHK-HTI.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan/ Ditanam/ Dipelihara RKTUPHHK-HTI RKT Tahun 2018 dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan tanaman Pokok sesuai Peta. Selanjutnya secara sampling dilakukan pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung diketahui bahwa telah terdapat penandaan pada seluruh sampe lokasi diantaranya : 1) Sempadan Sungai Pesab pada koordinat N 01°12'40,42" dan E 117°03'52,87" dapat sesuai dengan peta. 2) Sempadan Sungai Pesab pada koordinat N 01°12'38,49" dan E 117°03'48,36" dapat sesuai dengan peta. 3) Sempadan Sungai Pesab pada koordinat N 01°12'37,80" dan E 117°03'45,81" dapat sesuai dengan peta.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume panen kayu tanaman dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan total pada periode penilaian sebesar 0 m3 dari rencana 23.559,25 M3 atau terealisai 0 % (< 70%) - Realisasi luas tebangan total pada periode penilaian sebesar 0 Ha dari rencana 405 Ha atau terealisasi 0 % yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	CD	Buruk	Dapat diverifikasi Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 PT Sumalindo Hutani Jaya. Laporna telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan sesuai Laporan

<table>
<tr><th>NO</th><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No. 0031/2.0902/AU.1/0384-2/1/IV/2019 tanggal 15 Maret 2019. Kondisi kesehatan finansial PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2018 :

<table><tr><th>Indikator</th><th>Tahun 2018</th><th>Ket</th></tr><tr><td>Liabilitas</td><td>35,19</td><td><100</td></tr><tr><td>Solvabilitas</td><td>122,52</td><td>>100-150</td></tr><tr><td>Rentabilitas</td><td>-6,35</td><td>Negatif</td></tr><tr><td>Opini</td><td>Wajar Tanpa Pengecualian</td><td></td></tr></table>
Sumber : Laporan Keuangan PT SHJ
Berdasarkan Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2018 diketahui belum seluruhnya memenuhi norma Baik maupun Sedang.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan Audited Financial Highlights 2013–2018 diketahui realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan Tahun 2018 (perencanaan, perlindungan hutan, pembinaan hutan, pengadaan sarana dan peralatan kerja, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan SDM) terealisasi sebesar Rp. 1.712 dari rencana Rp. 2.458 atau teralisasi 69,7 % (60-79%) dari yang seharusnya. (dalam jutaan rupiah)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.6.3.
Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional</td><td>CD</td><td>Buruk</td><td>Berdasarkan Audited Financial Highlights 2013–2018 diketahui proporsi realisasi alokasi dana Tahun 2018 terdapat perbedaan sebesar 115,50% (>50%). Realisasi terbesar sebesar 132,00% pada Perencanaan dan realisasi terendah sebesar 16,50% pada Pengendalian Kebakaran.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.6.4.
Realisasi Pendanaan Yang Lancar</td><td>CD</td><td>Buruk</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada PT Sumalindo Huntai Jaya (Unit I) tidak lancar, hal tersebut ditandai dengan tidak adanya posting dan realisasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.6.5.
Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Modal yang ditanamkan di Hutan pada IUPHHK-HTI dapat berupa modal yang ditamankan kembali ke hutan dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Neraca tanaman Per Agustus 2019, sesuai Laporan Bulanan HTI diketahui bahwa PT Sumalindo Hutan Jaya (Unit I) telah merealisasikan tanaman seluas</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				5.831,56 Ha dari areal efektif kelola seluas 7.075,30 Ha atau teralisasi sebesar 82,42 %.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Buruk	Berdasarkan laporan bulanan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI diketahui realisasi kegiatan fisik penanaman pada Tahun 2018 s.d. Tahun 2019 per Agustus 2019 telah terealisasi seluas 54,50 Ha dari rencana seluas 791 Ha atau terealisasi sebesar 06,89 % (<50% yang seharusnya).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/21) x 100% = 47,62 %
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK (1)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Luas kawasan lindung yang dirinci dalam dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI (2010) periode 2010-2019 adalah seluas 783 ha tidak konsisten dengan luas kawasan lindung yang dirinci dalam dokumen Amdal (1995) seluas 1.033 ha. Walaupun demikian, manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan areal kawasan lindung yang ada dalam areal kerjanya dengan luas total 1.782 ha untuk mempersiapkan draft untuk revisi RKUPHHK-HTI mendatang - Guna keperluan operasional lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Manajemen PT SHJ-I No. 001/SK-SHJ I/I/2016 tanggal Januari 2016 tentang penetapan kawasan lindung PT SHJ-I seluas 1.782 ha yang juga merujuk pada dokumen ISFMP PT SHJ-I yang dipersiapkan untuk revisi RKUPHHK-HTI selanjutnya - Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sungai Pesab pada posisi koordinat sekitar N 01^{0}12'40" dan E 117^{0}03'50" dan pada posisi koordinat sekitar N 01^{0}13'35" dan E 117^{0}04'12", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 137,21% (5,9 km) dari yang seharusnya sepanjang 4,3 km sesuai dengan perkembangan blok RKT (prosentase nilai yang lebih dari 100% disebabkan karena panjang realisasi penandaan batas kawasan lindung melebihi kewajiban penandaan batas sampai 2019)
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Terkait citra landsat, belum ada peta hasil penafsiran citra landsat yang lebih baru tetapi pengadaannya sedang berproses, dengan bukti screenshot komunikasi email antara Region 38 dan manajemen di Jakarta tanggal 30 Jui 2019 terkait bantuan update citra terbaru untuk PT SHJ I, dan jawaban email dari Jakarta bertanggal pada hari yang sama - Berdasarkan citra yang ada diketahui bahwa tidak ada areal KL yang masih berhutan (VF dan/atau LOA) - Terdapat bukti-bukti terkait realisasi penamanan dari rencana penanaman/pengayaan areal kawasan lindung sempadan Sungai Pesab seluas 2 ha dengan jumlah bibit sebanyak 200 btg, berikut: a. BA Pelaksanaan rehabilitasi kawasan lindung No. 023//SHJ-I/FS/IX/2019 tanggal 26 September 2019. b. Terdapat foto-foto dokumentasi kegiatan dari sejak pembelian, pengangkutan, sampai

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penanaman di lapangan c. Peta dan koordinat lokasi penanaman rehabilitasi di sempadan Sungai Pesab
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	- Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-1 yang dilaksanakan tahun lalu (2018) sampai dilakukannya audit penilikan ke-2 saat ini (tahun 2019), terdapat tambahan bukti dokumen/kegiatan terkait sosialisasi kawasan lindung khususnya ke masyarakat sekitar hutan, seperti ke Desa Miau Baru, SP-IV, dan Desa Suka Maju - Berdasarkan hasil observasi lapangan di sempadan Sungai Pesab pada koordinat sekitar N $01^0$12’38,1” dan E $117^0$03’50,6” dan koordinat sekitar sekitar N $01^0$12’38” dan E $117^0$03’52” ditemukn bekas-bekas tebangan kayu ulin, juga ditemukan bekas perbaikan jembatan dengan kondisi jembatan yang masih lumayan baik, kondisi kayu-kayu jembatan masih cukup baik dan belum lapuk - Terdapat sebagian areal kawasan lindung yang masuk kedalam areal klaim masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah menaman tanaman sawit (Peta Hasil Survey Areal Bermasalah PT SHJ-I Skala 1:50.000), maupun tanah garapan masyarakat. Hal ini merupakan indikasi bahwa paling tidak terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan lindung yang ada dalam areal PT SHJ-I
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	Laporan pengelolaan KL yang sudah dilaksanakan oleh PT SHJ-I sampai dengan saat ini (2019) terekam dalam beberapa dokumen, seperti (a) Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan semester II tahun 2018 dan semester-I tahun 2019 (draft), (b) Laporan Biodiversity Flora dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Fauna di Kawasan Lindung dan Kawasan Produksi tahun 2016, dan (c) beberapa BA pelaksanaan dan/atau pemeliharaan tanda batas areal kawasan lindung. Areal kawasan lindung yang sudah dibahas dalam laporan ini adalah areal sempadan Sungai Pesab. Laporan ini belum mencakup pembahasan kegiatan pengelolaan untuk areal KPPN/KPSL. Disamping itu, PT SHJ-I juga belum melakukan sepenuhnya rencana kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang ada dalam dokumen perencanaan (RKL, 1995), seperti kegiatan penanaman pengayaan/ rehabilitasi areal Kawasan Lindung
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	- PT SHJ-I telah memiliki beberapa SOP terkait perlindungan hutan, seperti (a) SOP Pengendalian kebakaran hutan (No. SOP/SHJ-I/FP-01, tgl terbit 01-03-2017, revisi ke-1, terbitan ke-2). SOP ini secara explisit sudah mengacu ke peraturan terbaru yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (b) SOP Perlindungan dan pengamanan hutan (No. SOP/SHJ-I/FP-28, tgl terbit 1-03-2017, revisi ke-1, terbitan ke-2). SOP ini berisi antara lain deteksi dini dan penanganan gangguan akibat kebakaran, penanganan tumpahan bahan bakar dan pelumas, penanganan banjir, huru hara dan demonstrasi, (c) SOP Pengamanan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				areal kawasan lindung (No. SOP/SHJ-I/FP-026, tgl terbit 1-03-2017, revisi ke 1, terbitan ke-2), dan (d) SOP Penyelesaian konflik lahan (No. SOP/SHJ-I/FP-07, tgl terbit 10-03-2018, revisi ke 1, terbitan ke-2). SOP ini berisi antara lain prosedur penyelesaian konflik lahan dengan ruang lingkup sebagai berikut: (a) Pemetaan konflik lahan sebagai salah satu tahapan dalam analisa konflik lahan, (b) Penyusunan strategi dan rencana kerja penyelesaian konflik lahan, (c) Pelaksanaan rencana kerja penyelesaian konflik lahan, (d) Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelesaian konflik lahan, dan (e) Sistem pemutakhiran data dan informasi konflik lahan. - Berdasarkan dokumen perencanaan yang ada, maka SOP yang ada tersebut sudah dapat mengakomodasi sebagian besar jenis-jenis gangguan yang ada, yang masih kurang adalah PT SHJ-I belum memiliki SOP perlindungan hutan terkait kegiatan pembalakan liar
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	PT SHJ-I telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan (sarana damkar dan sarana satpam), tetapi khusus untuk sarana damkar belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	- PT SHJ I telah memiliki personil perlidungan hutan, yakni regu security dan RPK, dengan jumlah dan kompetensi personil belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan kompetensinya, diketahui bahwa dari keseluruhan personil inti RPK, baru 8 (delapan) orang personil yang memiliki salah

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				satu atau kedua macam sertifikat damkar yang dikeluarkan oleh PHKL dan/atau Manggala agni - Berdasarkan peraturan yang berlaku, PT SHJ I belum membentuk regu pendukung dan regu pembantuan (MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Selanjutnya, untuk mendukung program pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT SHJ I membentuk program DMPA (Desa Makmur Peduli Api) sejumlah 8 (delapan) kelompok yang intinya adalah upaya mengubah perilaku masyarakat dalam membuka lahan dengan cara tidak membakar, yang diselaraskan dengan program bantuan dan sekaligus sosialisasi yang diselenggarakan oleh PT SHJI.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Terdapat kegiatan-kegiatan implementasi perlindungan gangguan hutan yang telah dilakukan oleh PT SHJ-I, meliputi (a) tindakan preemptif (sosialisasi) antara lain dengan sosialisasi langsung ke desa atau sosialisasi tidak langsung dengan pemasangan papan informai/himbauan/larangan, (b) tindakan preventif (pencegahan) antara lain dengan melakukan kegiatan patroli dan/atau pemantauan hotspot, dan (c) tindakan represif (penindakan) antara lain dengan melaporkannya ke instasi terkait dan/atau meminta banuan TNI/POLRI terkait perlindungan dan pengemanan areal, namun kegiatan implementasi perlindungan gangguan hutan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hutan dan Lahan, yakni PT SHJ-I belum membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/24) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG (2)

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	PT SHJ-I telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku. SOP yang belum ada dan/atau masih kurang adalah SOP terkait Pengendalian Erosi/konservasi tanah dan air
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT SHJ-I telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. PT SHJ-I belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, dan design bak pantau erosi yang baru yang ada pada blok RKT 2019 belum sesuai SOP
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT SHJ-I telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak dan juga telah memenuhi ketentuan jumlah minimal GANIS PHPL BINHUT, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	D	Sedang	- PT SHJ-I telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, yakni dokumen RKL (1995) dan revisi RKU (2010) dan telah diimplementasikan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	vegetatif)			sebagian. Kegiatan yang belum dilakukan adalah penanaman LCC segera setelah kegiatan penyiapan lahan selesai dilakukan, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPL (1995). Lebih jauh, PT SHJ-I telah melakukan pengelolaan LB3 - PT SHJ-I telah melakukan pengelolaan limbah domestik dan LB3 dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan tempat-tempat sampah yang sudah memisahkan antara sampah anorganik dan sampah organik sampai kepada masing-masing TPS sampah anorganik dan organik, terdapat tangki tempat penyimpanan dan pendistrbusian bbm yang sudah dilengkapi dengan perangkap ceceran bbm, bangunan rumah genset yang sudah dilengkapi dengan bak penampung ceceran oli, bangunan gudang pupuk, bagunan TPS LB3 sebagai tempat penampungan oli bekas, wadah bekas pestisida, dan karung bekas pupuk, namun PT SHJ-I belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT SHJ-I telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1995) dan revisi RKU (2010) dan telah diimplementasikan
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	- Sampai saat ini kegiatan pemanaman dan/atau pemanenan dan/atau kegiatan lainnya seperti kegiatan/aktivitas bengkel/workshop masih sangat minim atau belum ada, sehingga beberapa hal seperti pengelolaan LB3 di area workshop/bengkel belum dapat diverifikasi. - PT SHJ I telah melakukan pengelolaan limbah domestik dan LB3 dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tempat-tempat sampah yang sudah memisahkan antara sampah anorganik dan sampah organik sampai kepada masing-masing TPS sampah anorganik dan organik, terdapat tangki tempat penyimpanan dan pendistrbusian bbm yang sudah dilengkapi dengan perangkap ceceran bbm, bangunan rumah genset yang sudah dilengkapi dengan bak penampung ceceran oli, bangunan gudang pupuk, bagunan TPS LB3 sebagai tempat penampungan oli bekas, wadah bekas pestisida, dan karung bekas pupuk. - Hasil uji lab air terhadap air sungai Pesab dan sungai Miau pada semester-II tahun 2018, diketahui bahwa hampir semua parameter yang dianalisis tidak ada yang melewati ambang/baku mutu, kecuali nilai parameter kesadahan pada inlet dan outlet Sungai Miau dan Sungai Pesab yang memang sejak studi Amdal sudah teridentifikasi demikian. - Berdasarkan perhitungan data hasil pemantauan erosi selama 12 bulan terakhir pada bak pantau erosi, diperoleh data laju erosi berkisar dari 0 s/d 0,72 ton/ha/tahun. Bila data laju erosi ini dibandingkan dengan kriteria yang ada dalam PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, dan dengan menganggap kedalaman rata-rata solum tanah di wilayah ini sekitar 150 cm, maka nilai laju erosi ini tergolong kedalam kelas laju erosi ringan. - Berdasarkan hal-hal yang telah disajikan diatas, diketahui selama periode setahun terakhir tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(30/36) x 100% = 83,33%

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK (3)

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	PT SHJ-I telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik, tetapi untuk (a) SOP Identifikasi jenis fauna sudah merujuk peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999 dan Permen LHK No. P.92 tahun 2018, tetapi belum merujuk ke Permen LHK No. 106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix CITES, dan (b) SOP Identifikasi jenis flora sudah merujuk peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999, Permen LHK No. P.92 tahun 2018, Appendix CIETS, dan IUCN Redlist, tetapi belum merujuk ke Permen LHK No. 106 tahun 2018
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	PT SHJ-I telah memiliki rekaman beberapa dokumen terkait hasil kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, seperti dokumen Amdal (1995), dokumen HCV Assessment Report (2014), dokumen Laporan monitoring dan analisis satwa vegetasi di kawasan lindung dan kawasan prouksi, tahun 2017, Laporan monitoring dan evaluasi tahunan HCS (High Carbon Stock) PT SHJ-I tahun 2019, dan Laporan tahunan monitoring evaluasi satwa vegetasi di kawasan lindung dan kawasan produksi PT SHJ-I tahun 2019. Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi telah dirinci berdasarkan peraturan yang berlaku saat kegiatan dilakukan, seperti status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku PP 7 tahun 1999 dan Permen LHK No. P.106 tahun 2018 , tingkat kerawanannya

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	PT SHJ-I memiliki sejumlah 5 (lima) buah prosedur yakni SOP terkait Pengelolaan flora, yakni (a) SOP Pengelolaan flora dan fauna dilindungi (No. SOP/SHJ-I/FS-39) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/SHJ-I/FS-44) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (c) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/SHJ-I/FS-47) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (d) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/SHJ-I/FS-48) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-0, terbitan ke-1), dan (e) SOP Pengelolaan jenis eksotik invasif di areal IUPHHK-HTI (No. SOP/SHJ-I/FS-49) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2). Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT SHJ-I sudah melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP. Kegiatan pengelolaan yang belum dan/atau masih kurang antara lain seperti (a) penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi, dan (b) menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di persemaian.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan dokumen HCV Assessment Report (2014), areal PT. Sumalindo Hutani Jaya I ditemukan 3 (tiga) jenis flora yang dilindungi berdasarkan PP 7/1999, IUCN Redlist, dan/atau Appendix CITES, yakni jenis Eusyderoxylon zwageri (Ulin), Pterospermum javanicum (Bayur), dan jenis Diospyros cf. macrophylla (Ebony) - Hasil identifikasi jenis-jenis flora yang dilakukan sampai dengan tahun 2017 tidak menemukan jenis dipterocarp sebagaimana diusulkan oleh studi HCV sebelumnya, namun pada tahun 2019 dalam Laporan Tahunan Monitoring Evaluasi Satwa dan Vegetasi di Kawasan Lindung dan Kawasan Produksi PT SHJ-I berhasil diidentifikasi 2 (dua) jenis dipterocarp dalam areal KPSL masing-masing dengan jumlah individu satu pohon, yakni jenis Balau (*Shorea paalatlicados*) dan jenis Keruing (*Dipterocarpus tempehes*) - Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	PT SHJ-I memiliki sejumlah 5 (lima) prosedur yakni SOP terkait Pengelolaan flora, yakni (a) SOP Pengelolaan flora dan fauna dilindungi (No. SOP/SHJ-I/FS-39) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/SHJ-I/FS-44) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (c) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/SHJ-I/FS-47) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2), (d) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/SHJ-I/FS-48) tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-0, terbitan ke-1), dan (e) SOP penanggulangan konflik manusia dan satwa liar (No. SOP/SHJ-I/FS -45, tgl terbit 01-03-2018, revisi ke-1, terbitan ke-2). Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT SHJ-I sudah melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam SOP. Kegiatan pengelolaan yang belum dan/atau masih kurang antara lain seperti (a) penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi dari jenis flora pakan satwa, (b) menyediakan jenis-jenis flora pakan satwa di persemaian, (c) Penanaman jenis-jenis flora yang merupakan sumber pakan satwa RTE dan satwa yang dikelola sebagai tanaman sisipan yang tidak akan ditebang. Pola tanaman sisipan didesain sebagai tanaman tepi, dan (d) Pembuatan peta lokasi rawan konflik manusia – satwa liar Skala 1:250.000
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan dokumen Amdal (1995) dan dokumen HCV Assessment Report (2014) diketahui bahwa didalam areal PT. Sumalindo Hutani Jaya I ditemukan beberapa spesies fauna dilindungi seperti macan dahan, orangutan, rusa, kijang, kancil, dan lain-lain. - Salah satu jenis fauna dilindungi yang ditemukan adalah orangutan. - Selanjutnya disebutkan didalam dokumen HCV Assessment Report (2014) bahwa adalah sangat sulit bagi spesies mamalia yang ditemukan di dalam areal ini untuk bertahan hidup, karena habitat hutan alam asli mereka telah dikonversi menjadi hutan tanaman. - Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki data/nformasi terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat berupa Ladang Masyarakat. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (lahan untuk pemukiman dan perladangan, air bersih dan papan untuk perumahan serta ketergantungannya terhadap hutan), dituangkan dalam dokumen Laporan Penilaian High Conservation Value (HCV) Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) NKT 5 dan NKT 6 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur Tahun 2014. Dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin termuat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 – 2019.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan namun untuk SOP Studi Data Dasar dan Studi Dampak Sosial dalam referensinya belum mengacu kepada Permen LHK Nomor:

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemanfaatan SDH			P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/BPHH/HPL.3/8/2016.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melaksanakan rekonstruksi penataan batas areal kerjanya dan telah terealisasi 100% dan terdapat bukti pal batas areal kerja UM di lapangan, akan tetapi terdapat klaim areal (kawasan kehidupan masyarakat setempat dan/atau wilayah adminitrasi desa) dalam areal kerja UM dan baru sebagian areal yang telah dilakukan pengukuran luas serta pengambilan titik koordinat lapangan, serta masih terdapat klaim/konflik lahan seluas ± 4.309,1 Ha.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki legalitas atas luas dan batas areal kerjanya dari pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan rekonstruksi penataan batas areal kerjanya akan tetapi masih terdapat Tumpang tindih areal kerja UM dengan pihak lainnnya seperti konflik batas kawasan hutan antara PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dengan PT Kapas dan PT Gunta Samba Kelapa Sawit seluas 722,1 Ha. Klaim areal oleh masyarakat Desa Miau Baru untuk perluasan pemukiman dan kelompok Tani masyarakat mencapai luasan 3.587. Sehingga total luasan Konflik Lahan dan Klaim adalah seluas ± 4.309,1 Ha
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26 /30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan, seperti yang termuat dalam SK IUPHHK-HA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I (SK No.: 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996) terkait dengan Kewajiban Kelola Sosial, kewajiban terhadap lingkungan dalam

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kewajiban Terhadap Ketenagakerjaan dalam Peraturan Kerja Bersama mulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan lengkap.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial, meliputi: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Hasil Hutan Bukan Kayu, Kelola Sosial (CSR) dan Perencanaan Tenaga Kerja.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Berdasarkan hasil wawacara dengan Kepala Desa Miau Baru dan Perwakilan masyarakat Desa Suka Maju diketahui bahwa sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara dan dokumentasi yang ditandatangani oleh perusahaan dan masyarakat.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	Realisasi biaya kegiatan Kelola Sosial PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I Tahun 2018 s.d. Juni 2019 sebesar adalah sebesar Rp. 46.075.000,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 102.162.000 atau tercapai prosentase biaya sebesar 45,09 %
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang termuat dalam data Rekap Realisasi Kegiatan Sosial PT SHJ Unit I Semester I dan II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, serta BA Serah Terima bantuan PT SHJ Unit I. Namun belum dilengkapi dengan Pelaporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti belum adanya Laporan kegiatan Tumpang Sari Masyarakat dan Budidaya Holtikultura.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/30) 100% = 86,67%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT SHJ Unit I meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan Borongan</td><td>Tidak Terdapat konraktor dan Borongan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan PT SHJ Unit I</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHBK</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal PT SHJ Unit I</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia</td></tr>
</table>
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki sebagian data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yg berbasis hutan dengan lengkap dan jelas, meliputi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Kelola Sosial /CSR, Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.</td></tr>
</table>

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dan telah dikomunikasikan dengan keberadaan Berita Acara Pelaksanaan dan Notulensi FGD DMPA di Desa Suka Maju, No: 001/FGD-DMPA/CD-SHJ/PSB/UM-SOS/03/2019 tanggal 13 Maret 2019.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SHJ Unit I terhadap masyarakat sekitar : 1. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Semester I & II PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2018, rata-rata realisasinya sebesar 62,64 % 2. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Semester I PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2018, realisasinya sebesar 24,91 % 3. Realisasi Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan FP Head masih menunggu persetujuan dari pihak Region 4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2019 sebesar 70 % (periode September 2019) 5. Realisasi Tanaman Kehidupan 0% Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SHJ Unit I sebesar : **{62,64 + 24,91 + 0 + 70 + 0}% : 5 = 157,15 % : 5 = 31,43 %** Realisasi biaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I untuk Tahun 2018 – 2019 tercapai prosentase biaya sebesar **31,43 %**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengn baik, namun pada Penilikan II Tahun 2019 diketahui bahwa salah satu kewajiban PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) kepada negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum ada realisasi pembayaran untuk tahun 2019 hingga Bulan September,

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				meskipun masih terdapat waktu periode pembayaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal IUPHHK HTI, dan SOP FPIC/PADIATAPA.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan Identifikasi Potensi Konflik di dalam dan sekitar arealnya, dan membuat Peta Spasial Potensi Konflik. Namun bentuk penyajian dari hasil Pemetaan Potensi Konflik belum dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL Nomor: P.5/2016 Bab II poin 3, dimana deskripsi potensi konflik merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I Lembaga yang bertugas menangani Resolusi Konflik adalah Forest Protection dibantu oleh Conflict Resolution officer serta mengikutsertakan pihak eksternal dalam hal ini Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyusun Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2019 sebesar Rp. 329.062.500,-
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, yaitu Berita Acara Penyelesaian Perambahan Lahan di Konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. Namun belum melaporkan proses penyelesaian

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				konflik yang pernah terjadi Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK, setiap 6 sekali pemegang izin wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil. XI Samarinda.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara pada Penilikan II Kinerja PHPL Tahun 2019, diperoleh bukti-bukti keberadaan adanya Hubungan Industrial di PT SHJ Unit I adalah sebagai berikut: 1. Wadah Hubungan Industrial termuat Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT Sumalindo Hutani Jaya Periode Tahun 2016-2018, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/2927/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan masa berlaku sampai 16 Oktober 2018 dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) di Distrik Sei Mao pada tanggal 20 September 2016 dengan peserta sebanyak 32 orang (terdapat Berita Acara dilengkapi daftar hadir) dan selain itu setiap karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) mendapatkan 1 (satu) buku saku PKB sebagai bentuk sosialisasi. Dengan berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sumalindo Hutani Jaya Periode 2016 – 2018, Unit Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya bersama Serikat Pekerja

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				telah sepakat membuat Surat Keputusan Bersama antara Serikat Pekerja SP Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya dengan Perwakilan Unit Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2018 perihal Kesepakatan Perpanjangan Dokumen PKB Periode 2016-2018 selama 1 tahun kedepan (2018-2019) 2. Gaji Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah mengacu kepada Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.594/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang UMK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 (sebesar Rp. 2.930.304,19) berdasarkan verifikasi Slip Gaji Bulan Agustus 2019. 3. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi SDM/Diklat karyawan (tercapai realisasi sebesar 86,11%) 4. Standar jenjang Karir PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen: a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sumalindo Hutani Jaya Periode 2016 – 2018 (Bab XI Pasal 68 sampai pasal 71) b. SOP Struktur Organisasi Rev. 1 (SOP/SHJ I/HR-17) tanggal 12 Juni 2017 c. SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan Rev. 1 (SOP/SHJ I/HR-18) tanggal 12 Juni 2017 d. SOP Promosi Rev. 1 (SOP/SHJ I/HR-20) tanggal 12 Juni 2017 e. SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja Rev. 1 (SOP/SHJ I/HR-36) tanggal 12 Juni 2017 f. SOP Pengembangan Karir (SOP/SHJ I/HR-39) tanggal 12 Juni 2017 5. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tahun 2018 - 2019. 6. Fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di Base Camp PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I Sei Pesab seperti Kantor, Ruang Meeting, Mes karyawan,

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kantin dan fasilitas yang lainnya terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai seperti kantor dan ruang meeting masih menjadi satu dengan mess karyawan. Hubungan Industrial PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada tingkat realisasi pengembangan kompetensi yang baru mencapai prosentase sebesar 86,11%
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT SHJ Unit I telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP dan telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan/Pelatihan Ganis PHPL Tahun 2018 s.d. Agustus 2029 sebesar 86,11 %. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB= 3 (kartu SIM masih berlaku) dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Baik	PT SHJ Unit I telah memiliki dokumen terkait dengan standar jenjang karir yang ketentuan dan peraturanya telah dijabarkan dalam PKB Periode Tahun 2016 - Tahun 2018 Bab XI Pasal 68 dan terdapat dokumen Prosedur Promosi yang telah mengakomodir ketentuan pada dokumen PKB tersebut, serta terdapat bukti implementasi tahapan proses promosi grade karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT SHJ Unit I telah mengimplementasikan terkait dengan tunjangan kesejahteraan yang mengacu pada PKB Tahun 2016 - 2018 seperti: (1) Penyesuaian dan kenaikan upah, (2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan (3) Jaminan Kesehatan. Namun, berdasarkan observasi lapangan belum terdapat perubahan signifikan terhadap pembenahan dari fasilitas Camp Pesab terutama di mess karyawan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	Pada periode audit Penilikan Ke-2 tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HT, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 seluas ± 10.000 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Dalam SK tersebut luas dan lokasi definitif ditetapkan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan. SK dilengkapi dengan lampiran peta skala skala 1:50.000. Lokasi dan luas areal IUPHHK-HT PT SHJ (Unit I) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal IUPHHK-HTI PT. SHJ seluas ± 10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi lampiran peta skala 1:50.000. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen perseroan antara lain : - Akta pendirian Nomor : 4 tanggal 1 April 1992, Notaris Benny Kristianto, SH. di DKI Jakarta - Akta perubahan (terakhir) Nomor : 21 tanggal 08 Desember 2014 oleh Notaris Linda Herawati, SH. Susunan pengurus : - Komisaris Utama : Stanley Najoan - Komisaris : Wisly Dwi Putra - Direktur Utama : Robert Siagian - Direktur : Hoesin - NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik ditetapkan tanggal 12 Februari 2019.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Pada periode audit Penilikan Ke-2, tidak terdapat perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah mendapatkan tagihan SPP IUPHHK sesuai : a. SPP No. 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 November 1991 dengan tagihan sebesarr Rp. 13.000.000,00 b. SPP No. 1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 Agustus 2002 senilai Rp. 2.538.640,00 Berdasarkan Bukti Setor SPP IIUPHHK diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			melaksanakan pembayaran sesuai dengan : a. Bukti Setor IIUPHHK-HT senilai Rp. 13.000.000 tanggal 1 Januari 1992. - Bukti Setor IIUPHHK-HT senilai Rp. 2.538.640 tanggal 23 Desember 2014.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Pada areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak terdapat izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	- Terdapat RKUPHHK-HTI revisi jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 2010 – 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010. SK ditandatangi dengan tandatangani pejabat berwenang dan distempel. Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HT skala 1 : 50.000. - PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan, diantaranya : a. RKTUPHHK-HT tahun 2018 telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61/Kpts/DK-II/2018 tanggal 5 Maret 2018 b. RKTUPHHK-HTI tahun 2019 telah disahkan secara *self approval* melalui SK Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan SK Nomor SK.001/RKT-SHJ-I/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 - PT Sumlindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki peta rencana penataan areal kerja yang memuat informasi blok dan petak RKT, areal yang boleh ditebang, areal yang tidak boleh ditebang, jalan dan sungai. Ganis PHPL Canhut atas nama Hubertus Hanu No. Reg. 00688-11/CANHUT/XX/2012 berlaku dari 13 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2021 berdasarkan SK.80/BPHP.XI-3/2018 tanggal 09 Februari 2018.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai. Pemeriksaan lapangan secara *sampling* dapat diverifikasi penandaan di lapangan diataranya : • Sempadan Sei. Pesab yang dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 01°12'40,42" dan E 117°03'52,87". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet dengan cat warna merah. • Sempadan Sei. Pesab yang dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 01°12'38,49" dan E 117°03'48,36". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet dengan cat warna merah. • Sempadan Sei. Pesab yang dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 01°12'37,80" dan E 117°03'45,81". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet dengan cat warna merah.
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019. Pemeriksaan lapangan secara sampling dapat diverifikasi penandaan di lapangan diataranya : - Plang RKTUPHHK-HT Tahun 2019 pada koordinat N 01°12' 57,71" dan E 117°04' 01,04" diverifikasi sesuai dengan peta - Patok Compartemen 43B/13 pada koordinat N 00°12'58,18" dan E 117°03' 54,55"dengan patok sesuai dengan peta. - Petak Compartemen 43A/13 pada koordinat N 00°12'58,14" dan E 117°03' 54,61"dengan patok sesuai dengan peta.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen revisi RKUPHHK-HTI jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 2010 – 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

			Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010-2019 atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HT PT SHJ (Unit I) dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**N/A**	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diketahui PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak melakukan penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal tananh kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	Pada periode audit bulan September 2018 s.d. Agustus 2019, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat kegiatan produksi kayu/ pemanenan kayu, sehingga belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dinilai telah memiliki komptensi, sarana dan prasarana, serta personil dalam pembuatan LHP sesuai dengan : - Penunjukan Personil Ganis PHPL PKB atas nama Fahrizal Ramu, S.P No.Reg. 01893-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa berlaku dari 18 Maret 2019 sampai dengan 17 Maret 2022 yang ditunjuk melalui SK No. SK.024/SHJ I-SMD/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 sebagai Pembuat LHP. - Hak akses SIPUHH berupa pemberian user id dan password untuk operasional SIPUHH. - Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainya.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil	**M**	Pada periode audit bulan September 2018- Agustus 2019, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK, sesuai dengan pemeriksaan SIPUHH. PT SHJ (Unit I) dinilai telah memiliki komptensi, sarana dan prasarana, serta personil dalam penerbitan dokumen SKSHHK sesuai dengan :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		- Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara. - Penunjukan Ganis PHPL PKB atas nama Heru Riyanto No.Reg. 00549-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai 29 September 2020 yang ditunjuk melalui SK No.SK.056/SHJ I-SMD/XI/2017 tanggal 01 November 2017 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan. - Penunjukan Ganis PHPL PKB atas nama Adriyana No.Reg. 01578-11/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai 25 Juni 2020 yang ditunjuk melalui SK No.SK.062/SHJ I-SMD/XI/2017 tanggal 10 November 2017 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara. - Penunjukan Ganis PHPL PKB atas nama Adriyana No.Reg. 01578-11/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai 25 Juni 2020 yang ditunjuk melalui SK No.SK.061/SHJ I-SMD/XI/2017 tanggal 10 November 2017 sebagai petugas verifikasi penerimaan kayu bulat di TPK Antara. - Hak akses SIPUHH berupa pemberian user id dan password untuk operasional SIPUHH. Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainya.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) .
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) .

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode audit bulan September 2018 - Agustus 2019, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menyiapkan tempat penyimpanan Arsip dokumen SKSHHK di Basecamp S. Pesab N 01^0 13' 16,34" E 117^0 04' 16,60.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Pada periode audit penilikan ke-2 (September 2018 s.d. Agustus 2019) diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi.
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan ke-2 (September 2018 s.d. Agustus 2019) diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak memiliki kewajiban pembayaran PSDH.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pada periode audit bulan September 2018-Agustus 2019, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit (September 2018 s.d. Agustus 2019), Peraturan Menteri Perdagangan Republik

			Indonesia Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada Penilikan Ke-2 PHPL PT SHJ (Unit I).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) pada periode audit (September 2018 s.d. Agustus 2019) belum terdapat Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Predikat BAIK dengan Sertifikat Nomor 020.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Dengan demikian, apabila terdapat kegiatan produksi kayu PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah berhak menggunakan logo tanda V-Legal sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang lengkap dan sah berupa : - Ringkasan Eksekutif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), September 1995 - Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), September 1995 - Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Desember 1994 - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), September 1995 Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL).

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) diverifikasi telah memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor : PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tgl 25 September 1995.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2018 dan Draft Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2019 secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai bukti tanda terima dari instansi terkait. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan, diantaranya : a) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei Pesab pada koordinat N 01°12'40,42" dan E 117°03'52,87". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet dengan cat warna merah. b) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei Pesab pada koordinat N 01°12'38,49" dan E 117°03'48,36". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet dengan cat warna merah. c) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei Pesab pada koordinat N 01°12'37,80" dan E 117°03'45,81". Terdapat penandaan Plang Kawasan Lindung dan Polet

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan cat warna merah. d) Lokasi Pemantauan debit air dengan stick pemantau tinggi muka air di Sei Pesab. e) Lokasi Pemantauan udara Ambient pada Basecamp dan Gudang Genset. f) Bersumber dari Auditor Sosial telah diverifikasi terdapat Bantuan sosial keagamaan, Bantuan honor guru, buku dan alat sekolah, Hewan kurban, Bibit ikan lele, Ternak puyuh, dan Pembinaan UMKM. g) Penyerapan tenaga kerja lokal.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	Pada periode audit Penilkan Ke-2, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Nomor : KEP. 566/2317/P2K3/PPK/DTKT/2018 tangggal 24 Juli 2018.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang Genset, dan Pos security. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan berdasarkan tanda terima APD. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (*assembly point*) di Basecamp S. Pesab PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki catatan kerja yang dibuat secara bulanan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Samarinda setiap Triwulan melalui Laporan P3K3. Pada Periode audit September 2018 s.d. Agustus 2019 diverifikasi terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja yaitu adanya kecelakaan ringan pada tangggal 28

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Januari 2019 di PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya telah terbentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo. Dapat diverifikasi kebedaan Surat Keputusan Nomor : KEP-12/DPC FSPK/SK/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP Kahutindo) PT Sumalindo Hutani Jaya masa Bhakti Tahun 2017 – 2019.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya telah terbentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo. Dapat diverifikasi kebedaan Surat Keputusan Nomor : KEP-12/DPC FSPK/SK/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP Kahutindo) PT Sumalindo Hutani Jaya masa Bhakti Tahun 2017 – 2019. Terdapat Keputusan Bersama antara PUK serikat Pekerja PT SHJ dengan Manajemen PT Sumalindo Hatani Jaya pada Tanggal 13 Oktober 2018 bahwa disepakati adanya perpanjangan masa berlakunya PKB/KKB selama 1 tahun, sehingga masa berlaku PKB sampai dengan 16 Oktober 2019.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur. Karyawan yang bekerja pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan Daftar Karyawan periode Agustus 2019 sebanyak 26 orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Dimas Rahardjo, Pendidikan Terakhir yaitu SLTA dengan Jabatan RPK Team Departemen Forest Protection. Ybs masuk kerja pada umur 21 Tahun 7 Bulan.

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Baik	3	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	56	66
NILAI KINERJA AKHIR			**84,85 %**	**BAIK** (tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK)

Samarinda, 18 Oktober 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur